EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM PADA ERA PEMERINTAHAN JOKOWI MENUJU TAHUN PEMILU 2024: REGRESI DEMOKRASI DI INDONESIA?

[1]Emiria Dinar Triana
emiriadinart24@gmail.com

Abstract
Democracy is the main factor for a country to be democratic. Elections are the benchmark or indicator that determines whether a country is democratic or not. The emergence of various phenomena that occurred during the leadership of Joko Widodo became a matter of political relations between actors. Democracy in Indonesia has regressed because during Jokowi's reign there were phenomena of increasing patterns of authoritarianism, lack of enforcement of human rights, low freedom of opinion and elections that were far from free and fair. Direct interaction between the ruling elite and the public is not far from the policies made. Political parties are considered less able to accommodate public interests towards the 2024 election year. The emergence of various political parties including Islamic political parties that represent identities to form coalitions has the aim of power rather than mobilising real public interests. Political coalitions often take coalition choices that make the dominance of political parties in the midst of a multiparty system cause democratic regression during Jokowi's leadership towards the 2024 election year.

Keywords: Elections, Democracy, Regression, Indonesia,

[1] Universitas Airlangga, Indonesia

Abstrak

Demokrasi merupakan faktor utama negara dapat dikatakan demokratis. Pemilu menjadi tolak ukur atau indikator penentu apakah negara menjadi demokratis atau tidak. Munculnya berbagai fenomena yang terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo menjadi perihal hubungan politik antar aktor. Demokrasi di Indonesia mengalami regresi karena pada masa pemerintahan Jokowi muncul fenomena-fenomena peningkatan corak otoriarianisme, minimnya penegakan Hak Asasi Manusia, rendahnya kebebasan berpendapat serta pemilihan yang jauh dari bebas dan adil. Interaksi langsung antara elite penguasa dan publik menjadi hal yang tidak jauh dari kebijakan yang dibuat. Partai Politik dinilai kurang dapat mengakomodasi kepentingan publik menuju tahun pemilu 2024. Munculnya berbagai Partai Politik termasuk partai politik islam yang merepresentasikan identitas untuk berkoalisi memiliki tujuan untuk kekuasaan dibandingkan dengan memobilisasi kepentingan publik secara riil. Koalisi politik tidak jarang mengambil pilihan koalisi yang membuat dominasi Partai politik di tengah sistem multipartai menimbulkan regresi demokrasi pada masa kepemimpinan Jokowi menuju tahun pemilu 2024.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Regresi, Indonesia,

PENDAHULUAN

Diskusi terkait dengan hubungan politik dan penyelenggara pemerintahan senantiasa berjalan dinamis dan banyak dipengaruhi oleh proses berdemokrasi[2]. Adanya sistem demokrasi di Indonesia seharusnya bisa menjadikan sistem pemerintahan yang menganut prinsip

[2] William. (2002). *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Routledge, p. 6-8.

keadilan, partisipasi masyarakat, dan kebebasan. Namun, praktik demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena penyimpangan penguasa yang semkain kuat. Sejumlah isu hingga peristiwa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mengarah kepada gangguan dalam prinsip demokrasi. Hal tersebut tentang menjadi perhatian bagi banyak elemen masyarakat dari atas ke bawah dan dari pusat ke daerah. Salah satu contoh yang dianggap menjadi kegagalan demokrasi adalah terjadinya perubahan batas umur usia calon wakil presiden yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun.

Peristiwa tersebut membuat banyak pihak berfikir ulang tentang kualitas demokrasi di Indonesia. Karena pada dasarnya, demokrasi adalah menjaga agar suatu kekuasaan berjalan dengan terbatas. Apalagi, banyak politisi saat ini hanya mengedepankan citra personalitas dan kehidupan sehari-hari pada pejabat tanpa memikirkan hal yang substansial itu senditi. Hal yang demikian justru memberikan pendidikan yang buruk kepada masyarakat karena mereka hanya disuguhi pencitraan yang dilakukan melalui media sosial, *reality show*, hingga aktivitas-aktivitas publik lainnya. Padahal merinci rencana kerja dan solusi konkrit untuk permasalahan bangsa jauh lebih penting daripada apapun.

Tocqueville menyebutkan bahwa Demokrasi dapat dibedakan menjadi dua aspek demokratisasi yaitu etos demokratik dan sistem yang demokratik[3]. Pendapat lainnya menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek demokrasi, adalah (1) hubungan kolektif pemerintahan dan kebaikan

[3] Nisbet, E. C. (2008). Media use, democratic citizen- ship, and communication gaps in developing democracy. International Journal of Public Opinion Research, Vol. 20, pp. 454–482.

bersama, (2) kondisi sah dan kolektif pemerintahan sendiri, dan (3) nilai otonomi individu. Ketika membaca lanskap Politik Indonesia saat ini, sistem demokratik menjadi prosedur utama untuk manajemen pemerintah demokratik yang didalamnya dibahas sistem hukum dan keputusan-keputusan publik yang dirumuskan secara demokratik. Watten 9228) menyebutkan pada Teori Demokratik yang dikemukakannya, hasil dari kebijakan atau keputusan publik merupakan prinsip utama untuk menjamin partisipasi publik, karena dengan demikian public akan merasakan manfaat dari keputusan yang dirumuskan melalui mobilisasi kepentingan publik. Kemudian, Etos Demokratik merupakan formasi nilai-nilai demokratik yang berada di masyarakat. seyogyanya adalah, pemerintah mampu menciptakan regulasi yang dimulai dari mobilisasi kepentingan publik melalui partai politik (Ikrar, 2023).

Munculnya sejumlah persoalan di bawah kepemimpinan Jokowi terutama dengan partai di dalam maupun kekuasaannya acapkali menjadi variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan demokrasi di Indonesia. Menurut Laporan *The Economist Intelligence,* Indonesia telah mengalami regresi demokrasi sejak 2008. Merujuk pada istilah Olvera (2010) yang menyebutkan bahwa kondisi demokrasi di Meksiko, sama halnya yang terjadi regresi demokrasi atau *Democracy decline.* Adanya penurunan demokrasi yang menjadi konsekuensi dari lambatnya institusi demokrasi yakni pemerintah, konsolidasi, koalisi, baik dari dari segi aspek pemantapan kapasitas institusi demokrasi atau pun kematangan dari budaya politik. Hal tersebut yang setidaknya terjadi di Indonesia saat ini, sehingga demokrasi yang terjadi tidak membawa aturan demokrasi, melainkan suatu keadaan yang disebut *exlusive democracy* yang

diciptakan oleh para penguasa dan elit politik. Diproses regresi demokrasi ini kemudian relasi kuasa antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat dominan. hubungan antar aktor di tengah kekuasaan yang terfragmentasi seperti saat ini tentu menjadi faktor penentu penyelenggara kekuasaan[4]. Tulisan ini bermaksud menganilisis eksistensi partai politik islam pada era pemerintahan Joko Widodo menuju tahun pemilu 2024. Dalam hal ini apakah ada regresi demokrasi di indonesia di bawah rezim presiden Joko Widodo.

METODE PENELELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan proses studi kasus. Dalam hal ini, studi kasus yang digunakan adalah partai politik islam di Indonesia yang ikut serta dalam pemilihan Umum 2019 dan pemilihan umum 2024. Sedangkan untuk pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tulisan ini menggunakan studi pustaka dari media yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi serta jurnal relevan.

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar variabel, verifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

[4] Bimber, B., Flanagin, A. J., & Stohl, C. (2005). Reconceptualizing collective action in the contemporary media environment. *Communication Theory*. Vol. 15. No. 4, pp 365.

PEMBAHASAN

Kehadiran partai politik islam dalam peta politik di Indonesia mengalami dinamika yang tidak stabil. Hal tersebut tdak lepas dari kemajemukan masyarakat Indonesia yang di dalamnya tidak hanya berisi umat islam semata. Namun, terdapat juga agama lain di dalamnya. Dinamika partai politik islam tersebut bisa dilihat dari partisipasi mereka pada setiap pemilihan umum di Indonesia. Perolehan suara partai politik berbasis islam cenderung mengalami penurunan sejak era reformasi. Hal tersebut tentunya harus menjadi catatan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karakteristik dan ideologi partai menjadi pertaruhan dalam penilaian masyarakat terhadap eksistensi partai politik Islam[5].

Oleh karena itu, partai Islam harus memahami budaya politik masyarakat Indonesia dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat[6]. Selain itu, perolehan suara partai politik islam dalam pemilu dipengaruhi oleh sejumlah perilaku para pemilih. Ada pemilih yang selalu memilih partai politik tertentu dalam setiap pemilu, dan ada juga yang tidak konsisten sehingga memilih partai berbeda dalam pemilu lainnya. Sikap dan perilaku pemilih yang konsisten terhadap satu partai tidak mudah terpengaruh terhadap masalah apapun yang terjadi menjelang pemilu. Sementara perilaku pemilih yang cenderung merubah pilihannya jauh lebih sensitif terhadap segala persoalan menjelang

[5] Triono, Triono. 2015. Faktor-FaktorPenyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11 (1):89–102. doi:https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.843.

[6] Yumitro, Gonda. 2014. Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia.*Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik* 17 (1):35–50.

pemilu. Jika pemilih tipe kedua banyak dalam pemilu, maka perolehan suara partai akan berfluktuasi signifikan[7].

Selain itu, jumlah umat Islam yang banyak belum tentu mempunyai pemikiran yang seragam. Sebaliknya, jumlah yang besar justru menyebabkan heterogenitas pada kalangan umat Islam. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa perbedaan agama, pendidikan, dan budaya hingga realitas yang dihadapi yang dihadapi masing-masing daerah[8]. Polarisasi yang terjadi dalam partai politik islam harus menjadi kekuatan para elit partai agar dapat membangun kekuatan politik yang efektif untuk menghasilkan kebijakan politik yang strategis. Prosedur strategis yang dimaksud memungkinkan perubahan kondisi masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Untuk mencapai agenda tersebut, diperlukan pemahaman bersama mengenai situasi politik saat ini, karena keberadaan partai Islam banyak dikritik

Berbagai konflik di internal partai Islam, seperti yang dialami PPP, PKB dan lain lain, menghambat berkembangnya kekuatan politik yang signifikan. Terkikisnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam tentu menjadi motivasi bagi partai Islam untuk berbenah, termasuk kerja sama politik antar partai tersebut (Tanuwidjaja 2010). Faktor terkikisnya dukungan masyarakat adalah: Pertama, masyarakat harus memahami bahwa memilih partai Islam adalah kewajiban agama. Kedua, partai-partai Islam tidak memberikan gambaran yang sama dalam perjuangannya. Ketiga, dipahami bahwa pemilu adalah sistem yang

[7] Guardado, Jenny, and Leonard Wantchekon. 2018. Do Electoral Handouts AffectVoting Behavior? *Electoral Studies* 53. Elsevier:139–149.

[8] Al Qurtuby, Sumanto. 2020. The Rise of Islamism and the Future of Indonesian Islam. *Journal of International Studies(Malaysia)* 16:105–128. doi:10.32890/jis2020.16.7.

berbahaya dan oleh karena itu partisipasi dalam pemilu adalah haram. Keempat, partai non-Islam memiliki aspek keislaman terutama dalam hal ritual dan amal sosial. Kelima, sinergi dan "snowball effect" antara ideologi rakyat dan kekuasaan sekuler menimbulkan permasalahan bagi partai politik Islam[9]

Realitas politik & Degradasi Partai Politik di Indonesia

Demokrasi sebetulnya muncul untuk menghindari kekuasaan yang terpusat hanya berada pada sekelompok orang atau oligarki, kesewenangan satu orang (tirani), atau kekuasaan yang berada pada aristokrasi, kekuasaan absolut diktator. Untuk tujuan tersebut, para sofis hadir di dalam politik akan tetapi mereka merelativir dan menyalahgunakan demokrasi menjadi sarana untuk kepentingan kelompok atau individu. Cara yang digunakan melalui retorika yang berusaha mempengaruhi dan mengelabui publik yang seharusnya dapat dimobilisasi kepentingannya melalui partai politik melalui demokrasi yang benar. Plato berpendapat bahwa bukan demokrasi yang melakukannya di dalam proses politik. Pemikiran Plato berdasarkan ajaran moral religius namun murni dari prinsip filsafat untuk melawan adanya ketidakadilan dan pembohongan publik dalam berpolitik.

Tentu perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan perubahan. Secara Historis, Indonesia sejak 1945-1998 melewati lima fase perkembangan demokrasi yang secara

[9] Waluyo, Tri Joko. 2021. The Changing Political Orientation of Air Tiris, Kampar, Riau Community towards Islamic Political Parties in General Elections (a Case Study: General lections in Indonesia). Journal of Islamic Marketing 12 (2). Emerald Publishing Limited:225–248. doi:https://doi.org/10.1108/JIMA-06- 2019-0118.

tidak langsung juga beriringan dengan perkembangan pemikiran ideologi Pancasila. Periodisasi ini berdasarkan perubahan konstitusi yang disebut dinamika politik domestik. Proses dari waktu ke waktu tersebut menjadi perubahan yang cukup signifikan di Indonesia, jika dulu dimulai dengan sidang sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menghasilkan pertemuan para kalangan kaum bangsawan, islamis dan kaum liberal barat pada suatu forum remuh yang bertujuan untuk menyepakati adanya keharusan ideologi Pancasila untuk Indonesia. Sidang tersebut berfokus pada legitimasi wilayah dan kedaulatan pemerintah Indonesia[10].

Fenomena yang muncul di Indonesia saat ini adalah regresi demokrasi yang telaah tentang relasi kuasa antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti penting. Ketidakstabilan politik mengacu pada perubahan tidak teratur dalam sistem politik, yang dapat dikaitkan dengan kerusuhan sosial dan kekerasan politik. Ketidakstabilan politik dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, hal ini dapat melibatkan seringnya pergantian pemerintahan melalui proses pemilu. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa penyesuaian ekonomi sesuai dengan kondisi pasar, dengan dampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya frekuensi pergantian pemerintahan dapat dikaitkan dengan ketidakpastian kebijakan dan beberapa ancaman terhadap hak kepemilikan. Kedua berfokus pada perubahan yang lebih radikal dalam

[10] San, Bobby. 2023. Unair Sele. nggarakan Seminar Nasional, Tata Kelola Pemilu dan Regresi Demokrasi di Indonesia. [online] diaskes Melalui:https://www.strategi.id/nusantara/10410969096/unair-selenggarakan-seminar nasional-tata-kelola-pemilu-dan-regresi-demokrasi-di-indonesia?page=7. Diaskes pada [30 November 2023]

sistem politik yang ada, yang dapat berupa perubahan rezim, misalnya, dari demokrasi menjadi kediktatoran melalui kudeta. Pergantian rezim dapat terjadi melalui kekerasan politik (kerusuhan, pemogokan, pembunuhan, dan revolusi) terhadap pemerintahan yang berkuasa atau melalui kekerasan dalam rezim yang mencakup kudeta[11].

Ketidakstabilan politik mengacu pada perubahan tidak teratur dalam sistem politik, yang dapat dikaitkan dengan kerusuhan sosial dan kekerasan politik. Ketidakstabilan politik dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, hal ini dapat melibatkan seringnya pergantian pemerintahan melalui proses pemilu. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa penyesuaian ekonomi sesuai dengan kondisi pasar, dengan dampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya frekuensi pergantian pemerintahan dapat dikaitkan dengan ketidakpastian kebijakan dan beberapa ancaman terhadap hak kepemilikan. Partai selalu berada dalam proses perubahan. Hal ini antara lain disebabkan karena mereka harus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan dalam konteks di mana mereka beroperasi secara lebih luas. Khususnya dalam beberapa dekade terakhir, perubahan-perubahan ini termasuk globalisasi perdagangan, keuangan, dan pasar; pembentukan aliansi politik regional secara kolektif dan multinasional seperti Uni Eropa dan NATO; revolusi komunikasi yang disebabkan oleh media elektronik, Internet, telepon seluler, dan akibatnya adalah akses berita berkecepatan tinggi; perkembangan transportasi, teknologi, dan demokratisasi yang mengancam masyarakat

[11] Djani, Luky. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

tradisional dan masyarakat umum – telah terakumulasi, dan dampaknya semakin besar.

Meskipun perubahan-perubahan tersebut mungkin tidak berbeda dengan perubahan-perubahan yang harus diadaptasi oleh partai-partai di masa lalu, kedalaman dan keluasan perubahan-perubahan tersebut mungkin tidak lebih besar, seperti halnya di dunia masa kini, kecepatan perubahan-perubahan tersebut dalam menghadapi partai-partai dan masyarakat. Perubahan pad prinsip partai merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dipilih oleh partai untuk diterapkan. Oleh karena itu, partai-partai berubah salah satunya karena mereka telah menciptakan keadaan yang memfasilitasi perubahan tersebut. Perubahan lain terjadi sebagai akibat dari menyebarnya pemerintahan demokratis secara dramatis, yang oleh Huntington (1991) diidentifikasi sebagai 'gelombang ketiga' demokratisasi. Tidak hanya jumlah partai demokratis dan sistem kepartaian yang meningkat, namun peningkatan ini juga terjadi dalam keadaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan 'gelombang' sebelumnya[12].

Terlepas dari keadaan yang diperkirakan berdampak pada partai-partai mapan, kasus-kasus 'gelombang ketiga' ini mendapat manfaat (atau menderita) dari pengawasan dan keterlibatan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Epstein membandingkan koalisi partai-partai Amerika yang memiliki federasi, atau apa yang disebut sebagai sistem partai 'pluralis', dengan pendekatan partai 'terprogram' yang umumnya dikaitkan dengan Eropa. Terdapat perbedaan konsekuensi di sini, dan klaim Epstein adalah bahwa sistem pluralis,

[12] Katz, Richard. 2006. Handbook of Political Party. SAGE Publications Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320

dibandingkan dengan partai-partai dominan Eropa yang terprogram dan berbasis massa, mungkin lebih mampu melayani kebijakan nasional dan tujuan demokrasi, serta lebih kohesif, berorientasi pada kebijakan, dan lebih baik dimobilisasi daripada sepupunya di Benua Eropa. Akademisi lain mempunyai penilaian evaluatif yang sangat berbeda. Namun ada kesepakatan bahwa operasi partai-partai di berbagai bidang seperti kampanye, perumusan dan implementasi kebijakan, penempatan staf dan organisasi, basis sumber daya, dan sumber pendanaan mempunyai karakteristik yang berbeda[13].

Seiring berjalannya waktu, partai-partai Amerika semakin menyesuaikan diri dengan konsep sistem partai yang kompetitif di pasar bebas, berpusat pada kandidat, dan fokus pada pemilu. Ada tanda-tanda bahwa partai-partai Eropa – dengan tingkat perubahan yang berbeda-beda di berbagai negara dan antar partai – sudah mulai bergerak ke arah ini. Transisi seperti ini mencerminkan pergeseran fungsional dan organisasional yang sangat besar dalam hal penekanan dan konsepsi bagi partai-partai Kontinental, dibandingkan dengan partai-partai yang berstruktur longgar dan berorientasi kampanye di Amerika Serikat. Perubahan yang terjadi jelas signifikan bagi kedua jenis sistem kepartaian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelanjutan peran partai dan sejauh mana relevansi sosial dan interaksi mereka dalam masyarakat. Khususnya, organisasi-organisasi yang hanya melakukan kampanye seperti di Amerika, mengingat ketergantungan mereka pada pendanaan non-partai yang besar, kegagalan mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak

[13] Ibid, hlm 80-82

terkait langsung dengan kampanye untuk jabatan publik, fragmentasi koalisi politik dan meningkatnya independensi para pemilih. berikutnya, serta fragmentasi dan kepatuhan (terhadap kandidat) pada organisasi partai, cenderung mengabaikan banyak fungsi yang dianggap penting bagi partai-partai di Eropa[14].

Hal yang menentukan bukanlah tipe rezim, apakah itu demokrasi atau bukan, melainkan frekuensi pergantian rezim dari waktu ke waktu yang membuat suatu negara stabil atau tidak stabil. Sebuah negara yang stabil, baik yang demokratis maupun yang diktator, adalah negara yang tidak mengalami perubahan tipe rezim selama jangka waktu tertentu, yang tentu saja berarti tidak ada tingkat kekerasan politik dan kerusuhan sipil. Alesina dan Perotti (1996) mencatat bahwa dengan tingkat kekerasan politik yang sama, kediktatoran lebih mungkin digulingkan oleh para ekstrimis dibandingkan dengan demokrasi yang stabil (Alesina & Perotti, 1996). Pergantian rezim dapat menyebabkan perubahan undang-undang, peraturan dan hak milik serta menciptakan ketidakpastian di pasar, yang berdampak negatif pada pertumbuhan. Memang benar tidak ada yang salah dalam memberikan gimmick dalam proses komunikasi politik, namun, hal tersebut harus menjadi perhatian untuk setidaknya menempatkan hal-hal yang substansial dalam proses komunikasi yang dimaksu. Hal yang penting dalam menyongsong Pemilu 2024 yakni dengan meningkatkan pemahaman akan politik karena hal tersebut akan mempengaruhi objektivitas pemilih.

[14] Barnard, F. "Between Opposition and Political Opposition, The Search Of Competitive Politics In Czechoslovakia", Canadian Journal of Political Science, Vol.5 No.4, Desember 1972.

Dalam demokrasi, persoalan eksistensi Partai politik dan persoalan manipulasi hukum untuk kepentingan politik tidak jarang menjadi polemik pada demokrasi di Indonesia saat ini. Tata Kelola Pemilu dan realitas politik menjadi dinamika tersendiri menuju proses pemilu 2024. Banyak Akademisi yang mengkritik paradigma positivistik dalam melihat realitas kekuasaan yang kemudian menjadi ancaman eksistensi demokrasi di Indonesia. Para pemasaran politik yang hanya melihat politik sebagai suatu alat komoditas jangka pendek yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam politik Indonesia. Semua negara demokrasi di dunia ini kemudian menetapkan dan menggunakan Model Demokrasi Perwakilan sebagai Sistem Utama. Pertanyaanya, siapa yang mempersiapkan dan menggerakkan. Demokrasi Perwakilan, Semua negara demokrasi menetapkan Partai Politik sebagai fasilitator dan penggerak Demokrasi Perwakilan. Karena itu dalam Subkajian Perbandingan Politik mengungkapkan suatu tesis yaitu *Political Party is necessary but not sufficient for functioning of democratic politics*. Dalam konteks aktual politik di Indonesia, hal yang penting pula untuk mengkritisi secara tajam terkait model partisipasi anak muda dalam politik. Demokrasi di Indonesia sedikitnya mengalami penurunan karena munculnya kebebasan sipil, penegakan HAM, dan tingkat pluralisme. Demokrasi di Indonesia mengalami degradasi ke demokrasi yang cacat[15].

Penulis mencontohkan fenomena sosial yang terjadi yakni terdapat dua aktivis yang mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan terkena pidana

[15] Surbakti, Ramlan. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

meski akhirnya dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Tidak hanya itu, degradas demokrasi di Indonesia juga berkaitan dengan persoalan lain misalnya rekayasa hukum ekonomi. Lebih kompleks lagi adanya campur tangan Presiden Joko Widodo yang memiliki peran sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan aktif pada proses Pemilu 2024. Hal ini tentu berkaitan dengan Eksekutif Power yang dimilikinya. Realita politik bahwa presiden Joko Widodo memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang dimilikinya tidak dapat menaikkan kembali. Tentu hal ini menjadi dinamika terdiri bagi Indonesia menjelang tahun Pemilu 2024 dan proses demokrasi di Indonesia.

Politik Gimmick & Regresi Demokrasi di Indonesia

Reformasi merupakan *turning point* dari kualitas demokrasi di Indonesia. Pada konteks pemerintahan, salah satu hal yang terkemuka adalah Freedom House yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara bebas secara moral. Kedati kecenderungan demokrasi beberapa tahun terakhir mengalami degradasi atau penurunan. Sementara The Economist melakukan klaim bahwa Indonesia merupakan negara pemilik demokrasi yang masih "cacat" atau *flawed democracy*. Salah satu kelemahan yang paling mendasar dari proses reformasi yang berlangsung sejak 1998 adalah adanya perubahan gerakan yang hanya berfokus pada membangun dan memperbaiki institusi negara atau *state institutions*. sementar aupaya pembangunan dan penhautan kapasitas negar acednerung tiak diupayakna. konseksuani yang terjadi adlaha

eistensi enagr apda kiehupsa sehari-hari menjadi lemah dan muncul keabsensian negara[16].

Gimmick Politik semakin merajalela di panggung politik Indonesia menjelang tahun politik 2024. Terlihat semakin banyak aktivitas politik yang dilakukan oleh para elit politik negeri untuk menciptakan strategi guna mendapatkan elektabilitas pada elektoral. terlihat pula beberapa inovasi positif yang dilakukan oleh para Partai Politik dan Calon kandidat pada proses demokrasi, selain itu juga adanya bentuk manipulasi dan penyimpangan dari substansi politik karena adanya praktik tidak etis pada substansi politik. Skor Indeks Demokrasi Indonesia.

Gambar 1

Sumber: The Economics Intelligence Unit

Menurut The Economics Intelligence Unit, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), cenderung menurun, yakni 6,3 pada 2020, terendah dalam satu decade terakhir. Pada saat yang sama Indeks Demokrasi di

[16] Heryanto, Gun, 2015. Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik. Universitas Islam Jakarta, Jakarta, hlm 25

berbagai negara juga menurun sejalan dengan terjadinya Covid-19 yang membatasi mobilitas horizontal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat juga harus menurut arah kebijakan negara untuk mengatasi wabah covid-19 tersebut. Indeks Demokrasi Indonesia mengalami puncaknya yakni mencapai 7,03 pada 2015, 6,97 pada 2016, 6,39 pada 2017 dan 2018, meningkat menjadi 6,48 pada 2019, anjlok lagi menjadi 6,3 pada 2020, terendah sejak EIU Menyusun indeks ini sejak 2006. pada 2021 dan 2022 Indeks Demokrasi Indonesia naik lagi menjadi 6,71. Pada 2021, posisi Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Namun pada 2022, meski nilai indeksnya sama 6,71, posisi Indonesia menurun dari 52 ke 54[17].

Menurut The EIU Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 Democracy Report menunjukkan adanya pengurangan yang sangat signifikan dalam hal kebebasan sipil, pluralisme, hingga fungsi pemerintahan. Indonesia masuk dalam kategori dari Demokrasi Elektoral menjadi Demokrasi yang cacat (Flawed Democracy). Pemilu tidak mampu mensejahterakan Masyarakat. Sejak 2019, pembatasan kebebasan sipil dan politik akomodasi yang menggabungkan sejumlah partai politik yang seharusnya menjadi oposisi ke dalam kabinet menyebabkan lemahnya check and balances serta kontrol sosial terhadap pemerintah. Pada 2022 ada Upaya penguatan budaya berdemokrasi pada Masyarakat sipil, namun ada kendala dari aparat keamanan ataupun elite di cabinet yang membawa kasus hukum hal-hal yang tidak berkenan di hati elite penguasa. Pada 2022, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai

[17] Surbakti, Ramlan. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

6,68. Dari Freedom House, skor demokrasi Indonesia juga mengalami kemunduran dari 65 pada 2013, menjadi 59 pada 2022. status Indonesia sebagai "Partly free" atau belum sepenuhnya demokratis. Penilaian didasari oleh Kebebasan sipil, Hak-hak politik, dan Lembaga-Lembaga demokrasi. Pada 2013 Budaya politik demokratis mendapatkan nilai 5,63 dan Kebebasan Sipil 7,06. Namun pada 2022, nilainya masing-masing 4,38 dan 6,18.

Kualitas Demokrasi Indonesia pada 2022 kalah dari Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Meski sama-sama memiliki tipe rezim Demokrasi yang cacat, tiga negara itu mencatatkan nilai lebih tinggi ketimbang Indonesia, masing-masing 7,30; 7,06 dan 6,33. Pada 2023-2024, kemungkinan besar terjadi regresi demokrasi di Indonesia yang disebabkan praktik-praktik politik yang terjadi sejak awal 2023 sampai akhir 2024. Ini disebabkan begitu intensenya Presiden Jokowi melakukan "cawe-cawe politik" untuk menggolkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto yang pada pilpres 2014 dan 2019 adalah pesaing kuatnya. Perlunya menjaga integritas penyelenggara dan penyelenggara pemilu. Pemilu harus mempunyai empat prinsip: kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Partai politik sangat penting dalam demokrasi perwakilan, namun partai politik saja tidak cukup. Banyak permasalahan politik dan demokrasi di Indonesia yang bermula dari partai politik. Demokrasi juga harus mampu mendorong penciptaan *equal rights.* Dalam sejarahnya ini termanifestasikan dalam Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis

yang mendorong urgensi peran sipil yang setara dalam dinamika politik dan demokrasi[18].

Banyaknya satu Hal yang menarik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah pola koneksi politik antar aktor. Ada interaksi antara elite dan masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk menghindari pengaruh persaingan kepentingan antara elit dan masyarakat dalam politik, ketika mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Dalam pengelolaan kekuasaan, empat model politik, yaitu komplementaritas, akomodasi, kompetisi, dan substitusi, sering muncul dan menguat. Model hubungannya adalah egaliter, yakni tidak jelas siapa musuh dan siapa kawan. Politisi sering kali menggunakan pengambilan pilihan, yang berujung pada pergantian mitra koalisi. Sebab, tidak ada satu partai pemenang pun dalam sistem multipartai yang terpecah sehingga semua partai bisa menikmati demokrasi ideologis. Dalam berbagai krisis, masyarakat kerap menunjukkan keterlibatannya melalui media massa dan media sosial. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan politik yang berbeda[19].

Partai politik sangat penting dalam demokrasi perwakilan, namun partai politik saja tidak cukup. Banyak permasalahan politik dan demokrasi di Indonesia yang bermula dari partai politik. Untuk itu, urgensi untuk menekankan integritas dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) harus memiliki empat prinsip yaitu jujur, akurat, transparan, dan akuntabel. Perihal Pemilu Demokrasi Adam Przeworski merumuskan demokrasi sebagai pelembagaan prosedur Pemilu sehingga

[18] Ibid

[19] Kusman, Airlangga Pribadi. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

menjamin kepastian hukum, dan pelembagaan ketidakpastian hasil Pemilu sehingga terbuka peluang bagi setiap Pesaing (*predictable procedure but unpredictable results*). Konsep demokrasi yang minimalis ini hanya melihat demokrasi dari aspek Pemilu tetapi kelebihannya tidak hanya dari segi empirik tetapi juga dari segi validitas eksternalnya. Apakah proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah melalui 5 tahapan Pemilu dan sebentar lagi memasuki Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu mengikuti rumusan tersebut Ataukah sebaliknya yakni unpredictable procedures but predictable results. Kesadaran politik dan partisipasi politik anak muda itu penting. Mengutip K.H. Ahmad Mustofa Bisri, yang tercipta adalah "republik rasa kerajaan". Baginya, kritik K.H. Ahmad Mustofa Bisri terhadap Soeharto dan Orde Baru masih relevan dengan konteks sekarang. Mendukung hal tersebut, maka beretika dalam politik itu penting. Etika menjadi sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik. Pemimpin hendaknya dapat mendistribusikan kekuasaan secara akuntabel dan terpercaya. Dalam mekanisme konstitusional yang terjadi di Indonesia saat ini, perlu dipahami bahwa, realitas yang ada hakim konstitusi bukan setengah dewa, lembaga tersebut mempunyai berbagai kepentingan pribadi.

Jika diidentifikasikan, Regresi Demokrasi dan Degradasi Partai Politik saat ini, sejumlah aktor yang diminta mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Jokowi adalah: Pertama Megawati Soekarnoputri, ia dianggap bagian penting PDIP yang juga merupakan sosok penting dalam posisi Joko Widodo selama menjadi pemimpin. Kedua, adalah Surya Paloh yang ditengarai menjadi koneksi erat antara Megawati dan Joko Widodo. Partai milik Surya Paloh yakni Nasdem juga menjadi bagian dari partai berkuasa. Namun, kini, Nasdem malah bergabung

dengan PKB. Ketiga ada nama Jusuf Kalla, karena pengalaman dan jejaring politiknya berpotensi menjadi orang menentukan dalam penyelenggaraan rezim Jokowi. Keempat ada Prabowo Subianto. Ia dianggap memiliki sumberdaya politik yang kuat untuk menentukan kekuasaan yang bisa memberikan kemenangan dalam Pemilu. Kelima ada Demokrat yang menjadi sejata baru dalam catur politik Indonesia. Keberadaan SBY di partai tersebut juga menjadi kartu politik yang kuat. Di luar nama-nama tersebut, ada aktor-aktor non kekuasaan yang dominan mempengaruhi wacana dan tindakan di ruang publik.

KESIMPULAN

Dinamika dalam Tata Kelola Pemilu dan realitas politik dalam dinamika demokrasi pada masa Jokowi mengalami perubahan. Partisipasi politik dan Demokrasi di Indonesia mengalami regresi atau kemunduran. Hal tersebut juga dibarengi dengan Regresi demokrasi karena realita politik yang diwarnai kebisingan, keterbelahan dukungan, persaingan dan hasrat kekuasaan. Proses pemilu tahun 2024 ini memberi ruang aktual para politisi untuk memperlihatkan motif kekuasaannya. Publik telah tersedot atensi dan energinya untuk penyelenggaraan pemilu tahun depan. Praktik dari komunikasi dominan ditandai oleh adanya pertarungan politisi, akan opini dan koalisi di ruang publik. Praktik pemasaran politik yang hanya melihat politik sebagai komoditas jangka pendek menimbulkan berbagai permasalahan dalam politik di Indonesia. Persoalan politik dan manipulasi hukum untuk kepentingan politik praktis dengan cara-cara realis membuktikan adanya dominasi elit politik menuju tahun politik 2024. Maka penting bahwasanya untuk menekankan urgensi dari penegakan integritas penyelenggara dan

penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu harus memiliki empat prinsip yaitu jujur, akurat, transparan, dan akuntabel. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjamin, kepastian prosedur dan ketidakpastian prediksi hasil pemilu. Demokrasi sudah seharusnya mendorong penciptaan equal rights dan demokrasi harus punya tradisi. Persoalan nyata yang paling berat yang dihadapi dalam regresi demokrasi adalah konstitusi yang diingkari dan dimanipulasi. Ketika kebebasan sudah dibatasi,intelektual dan media semakin perlawanan, maka untuk menyelamatkan demokrasi yakni hanya dengan melakukan revolusi demokrasi untuk mobilisasi publik menjad*i top priority* kembali.

REFERENSI

Agustino, Leo. "Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014", *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki*, Vol.33 No.1, Januari 2014.

Akmar, Zakiyatul. "Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.10 No.1, April 2019.

Aminuddin, M Faishal. "Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.1 No.1, Agustus 2010.

Barnard, F. "Between Opposition and Political Opposition, The Search Of Competitive Politics In Czechoslovakia", *Canadian Journal of Political Science*, Vol.5 No.4, Desember 1972.

Diamond, Larry dan Richard Gunther. "Species of Political Parties: A New Typology", *Party Politics*, Vol.9 No. 2, Maret 2003.

Baxter, L.A. and Montgomery, B.M. (1996). *Rela- ting: Dialogues and Dialectics.* New York: Guilford Press.

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 55/07/Th. XVII, 4 Juli 2014.

Bimber, B., Flanagin, A. J., & Stohl, C. (2005). Reconceptualizing collective action in the contemporary media environment. *Communication Theory*. Vol. 15. No. 4, pp 365.

Bratton, M., Mattes, R., & Gyimah-Boadi, E. (2005). *Public opinion, democracy, and market reform in Africa*. New York. NY: Cambridge University Press.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

Castell, Manuel (2012). The Network of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age. UK: Polity, Cambridge.

Djani, Luky. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

Heryanto, Gun, 2015. Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik. Universitas Islam Jakarta, Jakarta

Katz, Richard. 2006. Handbook of Political Party. SAGE Publications Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320

Kusman, Airlangga Pribadi. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

Nisbet, E. C. (2008). Media use, democratic citizen- ship, and communication gaps in developing democracy. *International Journal of Public Opi- nion Research*, Vol. 20, pp. 454–482.

Nisbet, Erik C., *et al.*, (2012). Internet Use and Democratic Demands: A Multinational, Multilevel Model of Internet Use and Citizen Attitudes About Democracy. *Journal of Communication*.

Olvera, Alberto J. (2010), *The Elusive Democracy Political Parties, Democratic Institutions and Civil Society in Mexico/Latin American*. Research Fel- low- Special Issues.

Papacharissi, Lihat Zizi A. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. UK: Polity, Cambridge.

Prasetya, Djoko. 2023. FISIP Unair Gelar Seminar Nasional Regresi Demokrasi di Indonesia. Lentera. com [online] diaskes

melaluihttps://lenteratoday.com/seminar-nasional regresi-demokrasi-di-indonesia/. Diakses pada [30 November 2023]

Ihsan, A Bakir, dkk. *Partai Polik dan Nation State: Revitalisasi Fungsi Kebangsaan Partai Politik*, Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Suryani. 2018. *Disalignment of Political Parties in Indonesia : Study on the Declining Electability of Prosperous Justice Party (PKS) in General Election 2014.* Atlantis Press: Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017), 2018.

Wollinetz, Steven B. "*Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies"*. Paper for the Conference on Political Parties: Changing Roles in Contemporary Democracies. Desember, 1994.

San, Bobby. 2023. Unair Sele. nggarakan Seminar Nasional, Tata Kelola Pemilu dan Regresi Demokrasi di Indonesia. [online] diakses melalui:https://www.strategi.id/nusantara/10410969096/unair-selenggarakan-seminar nasional-tata-kelola-pemilu-dan-regresi-demokrasi-di-indonesia?page=7. Diakses pada [30 November 2023]

Stephanie, Connery. 2021. Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial. (Online) Diakses pada https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial (08 Oktober 2023).

Susetyo, Romo Antonius. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

Surbakti, Ramlan. 2023. Regresi Demokrasi di Indonesia. Universitas Airlangga. Disampaikan saat Seminar Nasional. Ruang Adi Sukadana, FISIP, UNAIR.

William. (2002). *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Routledge, p. 6-8.